



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.148.858.449.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>380.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		1.528.858.449.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(482.601.313.592,01)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	239.320.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>243.281.313.592,01</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		482.601.313.592,01
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	20.847.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.504.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		35.351.000.000,00
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp.	832.815.520.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>123.607.575.100,99</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		956.423.095.100,99
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	55.875.929.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.392.888.693,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		54.483.040.307,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	2.854.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>75.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		2.929.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	1.893.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.354.000.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		3.247.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.600.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>75.000.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.		4.675.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	11.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.000.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		24.500.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	724.590.683.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>123.607.575.100,99</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		848.198.258.100,99

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	71.909.237.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		71.909.237.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	36.315.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		36.315.600.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya

1) Semula Rp. 25.080.344.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 25.080.344.000,00

c. Pendapatan dana penyesuaian

1) Semula Rp. 4.855.425.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 4.855.425.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 25.940.160.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.392.888.693,00)

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya perubahan Rp. 24.547.271.307,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja-belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 438.221.456.369,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 183.351.163.885,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 621.572.620.254,00

b. Belanja-belanja langsung

1) Semula Rp. 710.636.992.631,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 196.648.836.115,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 907.285.828.746,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf,a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	209.996.688.650,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>21.130.342.685,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		231.127.031.335,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	29.876.580.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>35.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		64.876.580.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	130.955.327.719,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>84.671.325.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		215.626.652.719,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	38.778.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>42.842.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		81.620.500.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	27.614.360.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(292.503.800,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		27.321.856.200,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		1.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 77.451.938.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.180.195.500,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 93.632.134.000,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 301.747.191.950,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 134.107.298.204,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 435.854.490.154,00

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 331.437.862.181,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 46.361.342.411,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 377.799.204.592,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah :

1) Semula Rp. 239.320.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 243.281.313.592,01

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 482.601.313.592,01

b. Pengeluaran sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula Rp. 239.320.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 243.281.313.592,01

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp. 482.601.313.592,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan : Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan : Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan : Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan : Rp. 0,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo setelah perubahan : Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi

setelah perubahan : Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal **15 Agustus 2011**

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal **15 Agustus 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN **2011** NOMOR **3**

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 Tahun Anggaran 2011

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	20,847,000,000.00	35,351,000,000.00	14,504,000,000.00	69.57
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	2,854,000,000.00	2,929,000,000.00	75,000,000.00	2.63
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	1,893,000,000.00	3,247,000,000.00	1,354,000,000.00	71.53
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,600,000,000.00	4,675,000,000.00	75,000,000.00	1.63
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,500,000,000.00	24,500,000,000.00	13,000,000,000.00	113.04
4. 2.	Dana Perimbangan	832,815,520,000.00	956,423,095,100.99	123,607,575,100.99	14.84
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	724,590,683,000.00	848,198,258,100.99	123,607,575,100.99	17.06
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	71,909,237,000.00	71,909,237,000.00	0	0
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	36,315,600,000.00	36,315,600,000.00	0	0
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	55,875,929,000.00	54,483,040,307.00	(1,392,888,693.00)	(2.49)
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	25,080,344,000.00	25,080,344,000.00	0	0
4. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4,855,425,000.00	4,855,425,000.00	0	0
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	25,940,160,000.00	24,547,271,307.00	(1,392,888,693.00)	(5.37)
	Jumlah	909,538,449,000.00	1,046,257,135,407.99	136,718,686,407.99	15.03
5.	BELANJA				
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	438,221,456,369.00	621,572,620,254.00	183,351,163,885.00	41.84
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	209,996,688,650.00	231,127,031,335.00	21,130,342,685.00	10.06
5. 1. 3.	Belanja Subsidi	29,876,580,000.00	64,876,580,000.00	35,000,000,000.00	117.15
5. 1. 4.	Belanja Hibah	130,955,327,719.00	234,426,652,719.00	103,471,325,000.00	79.01
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	38,778,500,000.00	62,820,500,000.00	24,042,000,000.00	62.00
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	27,614,360,000.00	27,321,856,200.00	(292,503,800.00)	(1.06)
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	0
5. 2.	Belanja Langsung	710,636,992,631.00	907,285,828,746.00	196,648,836,115.00	27.67
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	77,451,938,500.00	93,632,134,000.00	16,180,195,500.00	20.89
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	301,747,191,950.00	435,854,490,154.00	134,107,298,204.00	44.44
5. 2. 3.	Belanja Modal	331,437,862,181.00	377,799,204,592.00	46,361,342,411.00	13.99
	Jumlah	1,148,858,449,000.00	1,528,858,449,000.00	380,000,000,000.00	33.08
	Surplus / (Defisit)	(239,320,000,000.00)	(482,601,313,592.01)	(243,281,313,592.01)	101.66
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	239,320,000,000.00	482,601,313,592.01	243,281,313,592.01	101.66
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	239,320,000,000.00	482,601,313,592.01	243,281,313,592.01	101.66
	Jumlah	239,320,000,000.00	482,601,313,592.01	243,281,313,592.01	101.66

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pembiayaan neto	239,320,000,000.00	482,601,313,592.01	243,281,313,592.01	101.66
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0	0	0	0

Ranai, 15 Agustus 2011

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABL I